



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

"Keberhasilan adalah ketika kesempatan bertemu dengan apa yang direncanakan."

= Thomas Edison =



Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Jalan Khatib Sulaiman No. 1
Padang-Sumatera Barat



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, menjadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang merupakan dasar pembentukan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - e. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - f. Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - g. Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
 - h. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- i. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
- k. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- m. Rencana Kerja Dinas Pangan;
- n. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- o. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- r. Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- s. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
- w. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- y. Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
- z. Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- aa. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- bb. Rencana Kerja Dinas Kehutanan;
- cc. Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- dd. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- ee. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- ff. Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan;
- gg. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- hh. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah;
- ii. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
- jj. Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

kk. Rencana Kerja Badan Penghubung;

ll. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
dan

mm. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah.

- (3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rencana Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rencana Kerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (11) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (12) Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (14) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf l, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (15) Rencana Kerja Dinas Pangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (16) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (17) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari P Kerja strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (18) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (19) Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r, tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (20) Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s, tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (21) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (22) Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (23) Rencana Kerja Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (24) Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w, tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (25) Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (26) Rencana Kerja Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y, tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (27) Rencana Kerja Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z, tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (28) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa, tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (29) Rencana Kerja Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb, tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (30) Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc, tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (31) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd, tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (32) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee, tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (33) Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff, tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (34) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg, tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (35) Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (36) Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii, tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (37) Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (38) Rencana Kerja Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (39) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3


- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang mengalami penyesuaian atas usul Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
3.3 Program dan Kegiatan	50
3.4 Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	73
4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026	73
4.2 Pendanaan	77
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan Penting Substansial	103
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	103
5.3 Rencana Tindak Lanjut	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	13
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2024	28
Tabel 2.4	Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 2.5	Permasalahan dan Isu Strategis	32
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat	45
Tabel 3.1	Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2026	46
Tabel 3.2	Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026	49
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	52
Tabel 3.4	Identifikasi Risiko Strategis Rencana Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	64
Tabel 3.5	Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Atas Risiko Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	70
Tabel 4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja dengan melalui 6 (enam) tahapan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, yaitu :

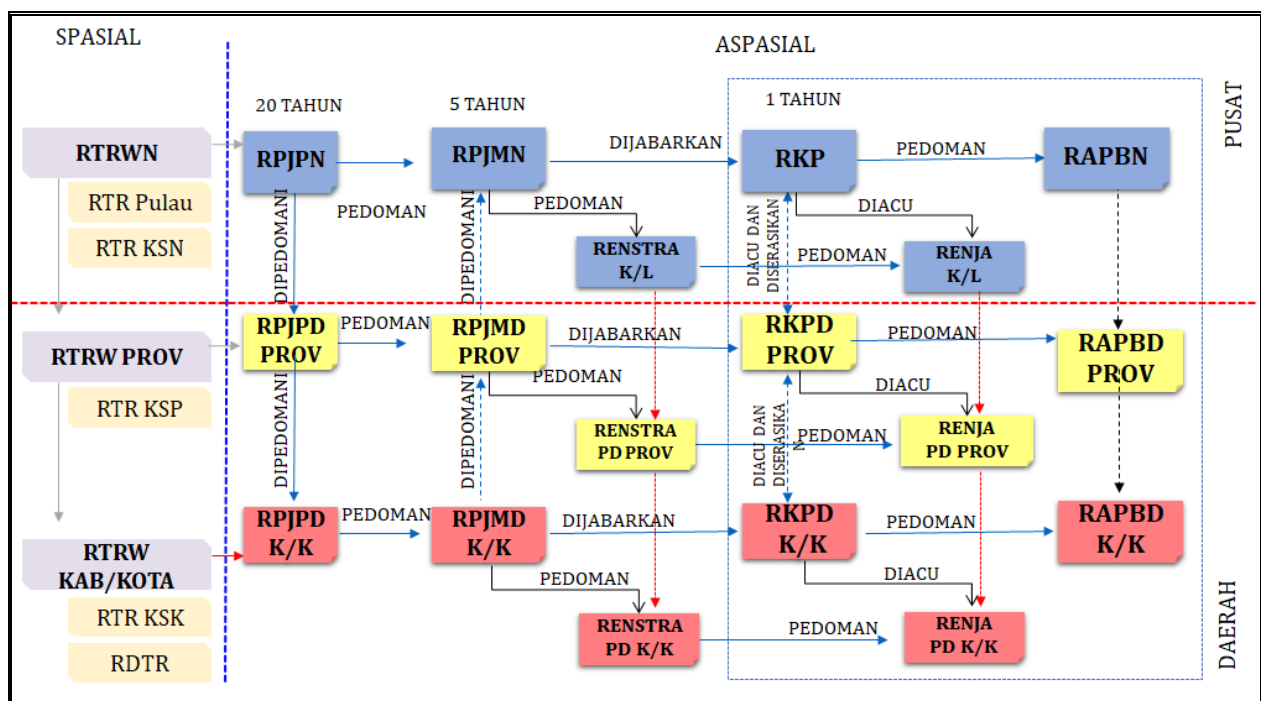
1. Persiapan penyusunan, yang meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Disamping itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menyatakan bahwa “Rancangan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026”.

Dalam rangka menjaga konsistensi dokumen perencanaan, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD. Keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen



Selanjutnya, Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2026. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menampung program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam KUA PPAS, Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Sumatera Barat;

2. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 juga diarahkan untuk sesuai dengan arahan dan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah tahun 2024, keberlanjutan rencana kerja tahun 2025, dinamika dan permasalahan yang berkembang di masyarakat, masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD dan berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Dokumen ini juga memuat faktor risiko yang disusun dalam kerangka manajemen risiko sampai level risiko operasional perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk implementasi kebijakan perencanaan berbasis risiko.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Renja Bappeda adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan. Tujuan Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Pendanaan Indikatif Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
2. Sebagai pedoman Pengendalian dan Evaluasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan Dokumen RKPD dan Renstra Bappeda dan dengan Renja K/L

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3.4. Mitigasi Risiko

Menjelaskan risiko-risiko dalam pencapaian sasaran strategis dan operasional

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Berisi uraian berupa penjelasan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2026, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2024 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Untuk mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 20.054.954.042,- Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (2 program urusan dan 1 program penunjang), 14 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Dari jumlah tersebut realisasi anggaran yang telah terserap adalah Rp 18.931.696.909,- atau sebesar 94,40%, dengan kinerja masing-masing program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan merupakan program dengan porsi anggaran paling besar yaitu Rp 17.180.377.559,- dengan realisasi keuangan sebesar 95,99% atau sebesar Rp 16.492.017.502,-. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target pada tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi 100%. Program ini terdiri atas 8 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan target pada tahun 2024 sebesar 81,83 dan terealisasi 84,09 atau sebesar 102,76%, dan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 97,03 dan terealisasi 100 atau sebesar 103,06%.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.403.991.200,- dan realisasi keuangan sebesar 77,62 % atau sebesar Rp 1.089.761.087,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi, dengan target kinerja program pada tahun 2024 sebesar 90% dan terealisasi sebesar 71,48%. Hal ini berarti bahwa masih ada target sasaran pembangunan yang belum tercapai sampai akhir tahun 2024, dimana sampai akhir tahun 2024 dari 54 Indikator Kinerja Utama hanya 34 indikator yang tercapai sesuai dengan target, sedangkan dari 230 Indikator Kinerja Daerah hanya 184 indikator yang tercapai sesuai dengan target.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pagu anggaran pada TA 2024 sebesar Rp 1.470.585.283,- dengan realisasi keuangan sebesar 91,79% atau sebesar Rp 1.349.918.320,-. Program ini terdiri atas 3 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang digunakan untuk mendukung capaian sasaran kinerja Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD, dengan target tahun 2024 yaitu 70% dan terealisasi sebesar 82,15%. Hal ini berarti bahwa sub kegiatan pada RKPD Tahun 2024 dinilai efektif dalam mendukung sasaran RPJMD.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				17.180.377.559	16.492.017.502	95,99
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	47.241.500	46.223.050	97,84
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100	29.239.100	29.173.850	99,78
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100	8.121.000	7.753.600	95,48
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100	9.881.400	9.295.600	94,07
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	11.745.521.727	11.235.139.422	95,65

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang/bulan	74 orang/bulan	100	11.481.779.227	10.971.596.922	95,96
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100	222.924.000	222.724.000	99,91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	13 laporan	13 laporan	100	40.818.500	40.818.500	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100	114.454.990	110.221.443	96,30
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	105.574.490	103.207.943	97,76
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100	2.275.000	2.275.000	100,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	4 laporan	100	6.605.500	4.738.500	71,74
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	115.500.000	114.730.000	99,33
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	154 Paket	154 Paket	100	115.500.000	114.730.000	99,33
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	3.031.272.597	2.904.582.701	95,82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Paket	22 paket	100	33.892.500	33.888.600	99,99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Paket	12 Paket	100	71.678.040	71.115.203	99,21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69 Paket	69 Paket	100	106.315.300	102.486.487	96,40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	100	24.240.000	24.155.900	99,65
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100	2.571.646.757	2.453.936.511	95,42
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	223.500.000	219.000.000	97,99
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	83.435.000	74.955.000	89,84
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	100	83.435.000	74.955.000	89,84
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	1.514.596.745	1.498.099.460	98,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100	323.788.500	314.880.455	97,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100	1.190.808.245	1.183.219.005	99,36
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	528.355.000	508.066.426	96,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	10 unit	10 unit	90	357.400.000	346.384.247	96,92

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52 unit	52 unit	100	50.250.000	42.730.000	85,03
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100	93.455.000	91.879.229	98,31
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28 Unit	28 Unit	96,36	27.250.000	27.072.950	99,35
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	90%	90,43%	100,48	1.403.991.200	1.089.761.087	77,62
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3 dokumen	3 dokumen	100	1.044.603.300	847.664.000	81,15
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	50.596.500	50.581.250	99,97
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1 dokumen Berita Acara	1 dokumen Berita Acara	100	255.901.100	255.781.100	99,95
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3 dokumen	3 dokumen	100	738.105.700	541.301.650	73,34
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	79.103.750	79.084.050	99,98
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	57.408.500	46.535.500	81,06
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	38 Orang	38 Orang	100	88.179.400	52.035.637	59,01
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	90,43%	100,48	213.800.000	143.525.950	67,13
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	2 laporan	2 laporan	100	81.376.500	12.381.500	15,22
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	38 dokumen	38 dokumen	100	132.423.500	131.144.450	99,03
III	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	70%	82,15%	117,36	1.470.585.283	1.349.918.320	91,79
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 dokumen	3 dokumen	100	624.579.100	583.414.470	93,41
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	95.818.200	87.213.700	91,02
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	3 Laporan	3 Laporan	100	38.183.800	37.362.800	97,85

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Daerah Bidang Pemerintahan						
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 laporan	100	67.996.300	67.125.600	98,72
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	1 laporan	100	21.723.100	21.693.100	99,86
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	91.233.100	81.974.100	89,85
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	3 Laporan	100	31.277.700	31.275.200	99,99
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 laporan	100	85.670.400	77.399.970	90,35
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	100	192.676.500	179.370.500	93,09
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3 dokumen	3 dokumen	100	503.304.433	448.445.050	89,10
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	60.419.250	60.350.200	99,89
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 rumusan	3 rumusan	100	31.572.900	31.567.200	99,98
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 laporan	100	117.581.900	110.832.050	94,26
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	1 laporan	100	61.315.300	37.263.000	60,77
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	38.470.000	38.426.000	99,89
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 dokumen	3 dokumen	100	28.720.000	28.716.000	99,99
	Pelaksanaan Monitoring dan	1 Laporan	1 laporan	100	110.087.483	103.864.000	94,33

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 laporan	1 laporan	100	55.137.600	37.444.600	67,91
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3 dokumen	3 dokumen	100	345.701.750	318.058.800	92,81
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 dokumen	100	59.174.000	58.390.100	98,68
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 rumusan	1 rumusan	100	36.357.300	36.103.800	99,30
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 laporan	100	42.577.800	40.165.950	94,34
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	100	28.047.300	26.477.000	94,40
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	100	22.428.900	22.421.900	99,97
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan.	1 laporan	100	34.378.350	33.735.450	98,13
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 laporan	100	119.738.100	100.764.600	84,15

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Sementara itu, evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 serta pengaruhnya terhadap capaian target kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024 s.d Tahun Berjalan Tahun 2025**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01	PERENCANAAN										
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.1.1.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	37	18	6	6	100	6	30	81,08
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	24	16	4	4	100	4	24	100,00
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	24	8	4	4	100	4	16	66,67
5.1.1.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	591	252	74	74	100	100	426	72,08

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	72	36	12	12	100	12	60	83,33
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	78	39	13	13	100	13	65	83,33
5.1.1.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	2	2	2	100	2	6	50,00
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	24	12	4	4	100	4	20	83,33
5.1.1.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	860	175	168	154	92	168	497	57,79

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	336	80	-	-	-	84	164	48,81
5.1.1.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi Umum	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	145	61	24	22	92	24	107	73,79
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	102	51	17	12	71	17	80	78,43
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	450	219	75	69	92	75	363	80,67
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	28	10	10	100	-	38	63,33
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	13	4	4	100	4	21	84,00
5.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	24	12	1	1	100	1	14	58,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5.1.1.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	50	30	-	-	-	4	34	68,00
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	22	3	6	5	83	-	8	36,36
5.1.1.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	72	36	12	12	100	4	52	72,22
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	72	36	12	12	100	1	49	68,06
5.1.1.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	600	300	100	100	100	100	500,00	83,33
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	29	12	10	83	11	50	83,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	415	164	72	52	72	70	286	68,92
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	288	163	48	28	58	48	239	82,99
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	%	95	77,14	90	72,57	80,63	92	80,57	84,81
5.01.02.1.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	dokumen	18	7	3	3	100	3	13,00	72,22
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen	12	7	3	3	100	3	13	108,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.1.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	dokumen	24	9	4	4	100,00	4	17,00	70,83
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	dokumen	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang	6	3	38	38	100	1	42	700,00
5.01.02.1.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	%	95	77,14	90	72,57	80,63	92	80,57	84,81
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	13	7	2	2	100	2	11	84,62
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	18	6	3	-	-	3	9	50,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	dokumen	262	153	38	38	100	38	229	87,40
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	%	80	77,38	70	82,15	117	75	78,18	97,72
5.01.03.1.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	20	9	3	3	100	3	15	75,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	20	9	3	3	100	3	15	75,00
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.03.1.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	20	9	3	3	100	3	15	75,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	20	9	3	3	100	3	15	75,00
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	20	9	3	3	100	3	15	75,00
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	14	7	3	3	100	3	13	92,86
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan	20	9	-	-	-	3	12	60,00
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	laporan	6	3	1	1	100	1	5	83,33

Dari data sebagaimana tabel 2.2 tersebut di atas dapat dilihat :

1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

- a. Dalam rangka pencapaian target kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan 3 program (1 program penunjang urusan dan 2 program urusan) dengan 3 indikator program, 14 kegiatan dengan 14 indikator kegiatan, dan 53 sub kegiatan dengan 53 indikator keluaran.
- b. Dari 3 program dengan 3 indikator kinerja program, masih terdapat 1 program yang targetnya belum tercapai yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target kinerja program yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi dengan target sebesar 90% dan terealisasi sebesar 74,72% atau sebesar 83,02%.

Indikator kinerja program yang belum tercapai pada tahun 2024 ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan :

- 1) Target IKU dan IKD pada beberapa perangkat daerah banyak yang tidak tercapai disebabkan tidak tepatnya penempatan belanja pada sub kegiatan pendukung.
 - 2) Belum konsistennya melakukan evaluasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu melaksanakan evaluasi capaian rencana kinerja perangkat daerah per triwulan dikarenakan beban kerja yang cukup tinggi.
 - 3) Minimnya informasi dari Perangkat Daerah terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan analisis data capaian kinerja pembangunan daerah.
- c. Sementara itu, program yang sudah tercapai target indikatornya terdapat pada 2 program, yaitu :
- 1) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target kinerja program yaitu Persentase efektivitas kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD dengan target sebesar 70% dan terealisasi sebesar 82,15% atau sebesar 117,36%. Faktor-faktor penyebab pencapaian kinerja program memenuhi/melampaui target kinerja dikarenakan efektifnya koordinasi dan komunikasi antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Perangkat Daerah mitra dalam penyusunan dokumen serta dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target kinerja program yaitu Persentase ketercapaian urusan pemerintahan daerah dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Faktor-

faktor penyebab pencapaian kinerja program pada tahun 2024 diantaranya :

- Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

d. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Dari 14 kegiatan dengan 14 indikator yang direncanakan, terdapat 1 kegiatan dengan 1 indikator yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan 13 kegiatan yang indikatornya memenuhi target yang direncanakan dengan capaian sebesar 100%. 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target yang direncanakan tersebut yaitu Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian sebesar 79,42% dari target 90% dan realisasi 71,48%. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut adalah :

- 1) Pelaksanaan kegiatan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah belum maksimal dan belum dilakukan secara berkala.
- 2) Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat dari ketercapaian pelaksanaan kinerja perangkat daerah belum maksimal dilakukan.
- 3) Tindak lanjut evaluasi terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah belum dilaksanakan.

e. Realisasi Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun 2024, dari 53 sub kegiatan terdapat 11 sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90% yang disebabkan terjadinya efisiensi belanja sesuai dengan arahan Kepala Daerah. 11 sub kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90% tersebut secara garis besar tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra.

Kinerja Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diukur melalui sasaran kinerja Meningkatkan Kualitas Perencanaan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan, pada tahun 2024 tercapai sebesar 94,59% dari target 81% atau dengan angka capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 116,78%. Nilai ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan perencanaan telah berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas perencanaan di Sumatera Barat.

3. Kebijakan dan strategi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang akan dilakukan pada Tahun 2026 untuk mengatasi faktor penghambat tidak

tercapainya sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 antara lain :

- a. Mendorong dan memastikan Perangkat Daerah melakukan Forum Perangkat Daerah tepat waktu sesuai Kalender Perencanaan dengan pelaksanaan pengendalian rumusan kebijakan oleh Bappeda yang mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
- b. Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kemendagri dan/atau Bappenas agar Keselarasan dalam dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen RPJMN dan RKP dapat mencapai nilai yang Maksimum.
- c. Memperkuat upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan dan penganggaran serta memastikan prioritas pembangunan daerah dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- d. Mengoptimalkan tindak lanjut pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui optimalisasi evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan Perangkat Daerah serta kualitas hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan analisis terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dengan upaya mendorong tim verifikasi untuk hadir disetiap jadwal pembahasan, menelaah keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP, dan Menelaah Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah.
- f. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala melalui pertemuan agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada pada sasaran strategis Perangkat Daerah.
- g. Melaksanakan pengendalian dan monitoring untuk memastikan Perangkat Daerah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil evaluasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah. Dokumen Perencanaan tersebut antara lain :

1. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Penyusunan Dokumen Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

3. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan;
4. Database Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kebijakan Satu Data Indonesia;
5. Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan dokumen Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Renstra dan Renja);
6. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan Kabupaten/kota (RPJPD, RPJMD dan RKPD) se Sumatera Barat;

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean governance, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Selanjutnya, kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2.1 berikut :

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Perencanaan	%	77	81	85	89	79,97	94,59	85	89	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kinerja OPD	%	79,25	80,25	81,25	82,25	81,73	84,09	82,25	82,83	
3.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	%	86,00	87,00	89,00	91,00	96,93	100	97,15	97,25	
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2024							106,57	107,53			

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian target kinerja Sasaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”, karena realisasi 3 (tiga) indikator kinerja

sasaran strategisnya mencapai 100% keatas. Secara rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 107,53% dengan realisasi anggaran sebesar 94,40%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tentu ada tantangan dan peluang untuk lima tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda. Setelah dilakukan identifikasi resiko terhadap beberapa akar masalah dalam pencapaian kinerja pelayanan Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan penunjang perencanaan, maka dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Pemetaan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas Perencanaan Pembangunan belum optimal sehingga mengakibatkan target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan belum	Belum optimalnya Proses tahapan perencanaan	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran
		Belum optimalnya pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
tercapainya dengan maksimal	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Belum maksimalnya penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan	
		Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat dan Kabupaten/Kota	
		Penjenjangan indikator kinerja belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja	
		Masih adanya data dan informasi pembangunan yang belum akurat, valid dan mutakhir.	
		Masih rendahnya kualitas analisis data dan informasi pembangunan daerah	
		Belum optimalnya peningkatan kapasitas kompetensi SDM Fungsional Perencana	
	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal		Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan
			Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya sampai kepada outcome dan impact dari pelaksanaan program dan kegiatan
			Keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat berkontribusi mendukung misi 8 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029 pada tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan

pelayanan publik yang efektif berbasis digital dengan sasaran yaitu efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertugas mengoordinir perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan Pembangunan. Disamping itu Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan fungsi konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mencerminkan lingkungan yang kolaboratif dan sinergis antar pihak yang terkait di dalamnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, tantangan yang dihadapi adalah :

1. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan masih rendah menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang sehingga kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.
2. Menciptakan inovasi pelaksanaan Musrenbang yang efektif yang dapat menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dari proses Bottom Up, agar memperoleh akses yang cukup memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan.
3. Konsistensi perencanaan selama proses perencanaan dan penganggaran berlangsung pada seluruh Perangkat Daerah memerlukan pendampingan, pengawalan, monitoring dan koordinasi intensif.
4. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman oleh semua Perangkat Daerah secara berjenjang.
5. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Bappeda Provinsi Sumatera Barat agar memiliki kapasitas untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
6. Dukungan Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal.

Sementara itu, terdapat peluang bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tupoksinya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, antara lain :

1. Kepedulian dan partisipasi masyarakat baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Dukungan SDM Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan kompetensi dan kualitas personil yang menunjang kinerja organisasi semakin meningkatkan peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Dukungan sistim informasi berikut pengembangannya dalam penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tabel 2.3.2 berikut :

Tabel 2.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. ▪ Belum optimalnya pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang. ▪ Belum maksimalnya penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan. ▪ Belum optimalnya keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat dan Kabupaten/Kota. ▪ Penjenjangan indikator kinerja belum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perencanaan dan Penganggaran yang bersifat imperatif. ▪ Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap realisasi target perencanaan. ▪ Penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan. ▪ Peningkatan kapasitas SDM Perencana. ▪ Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Permasalahan	Isu Strategis
<p>tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih adanya data dan informasi pembangunan yang belum akurat, valid dan mutakhir ▪ Masih rendahnya kualitas analisis data dan informasi pembangunan daerah. ▪ Belum optimalnya peningkatan kapasitas kompetensi SDM Fungsional Perencana. ▪ Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan. ▪ Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya sampai kepada outcome dan impact dari pelaksanaan program dan kegiatan. ▪ Keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja.

Isu-isu strategis sebagaimana tergambar pada tabel diatas menjadi perhatian dalam rencana kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat karena dampaknya yang signifikan terhadap perencanaan pembangunan di masa depan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan Awal RKPD dengan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2026, termasuk indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif.

Hasil analisa kebutuhan pagu anggaran tahun 2026 Bappeda Provinsi Sumatera Barat terhadap pagu Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Provinsi Sumatera Barat

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
5	01					29.067.462.000	PERENCANAAN					29.067.462.000	
5	01	01				15.696.694.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100 persen		15.696.694.000	
5	01	01	1.01			112.143.460	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%		112.143.460	
5	01	01	1.01	01		62.312.460	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen		62.312.460	
5	01	01	1.01	06		14.147.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan		14.147.500	
5	01	01	1.01	07		35.683.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan		35.683.500	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	10.963.561.565	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	10.963.561.565	
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	10.653.509.765	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	10.653.509.765	
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	236.551.800	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 dokumen	236.551.800	
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	73.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	73.500.000	
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	149.275.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	149.275.000	
5 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	119.400.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	119.400.000	
5 01 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	29.875.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	29.875.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	195.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	195.500.000	
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	67.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	67.500.000	
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	... Orang	65.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	... Orang	65.000.000	
5 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	... Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	... Orang	-	
5 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	... Orang	63.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	... Orang	63.000.000	
5 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.507.760.791	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.507.760.791	
5 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 jenis	21.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 jenis	21.000.000	
5 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 jenis	159.248.914	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 jenis	159.248.914	
5 01 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	164.590.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	164.590.500	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	310.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	62 Paket	310.000.000	
5 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	26.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	26.250.000	
5 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	... Laporan	540.021.377	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	... Laporan	540.021.377	
5 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	... Dokumen	286.650.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	... Dokumen	286.650.000	
5 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan barang Milik Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	369.538.266	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan barang Milik Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	369.538.266	
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	157.500.000	Pengadaan Mebel		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	157.500.000	
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	212.038.266	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	212.038.266	
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.738.403.168	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.738.403.168	
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	371.340.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	371.340.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.367.063.168	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.367.063.168		
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	660.511.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100%	660.511.750		
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	357.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	357.000.000		
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	61.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	61.750.000		
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	210.261.750	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	210.261.750		
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	31.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	31.500.000		
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 persen	5.121.738.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menjaga keselarasan dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah		Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	95 persen	5.121.738.000		
5 01 02 1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	2.962.218.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	3 dokumen	2.962.218.000		
5 01 02 1.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	146.218.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	146.218.000		

Kodefikasi	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 02 1.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	330.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	330.000.000	
5 01 02 1.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	286.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	286.000.000	
5 01 02 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	-	
5 01 02 1.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	660.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	660.000.000	
5 01 02 1.01 06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.540.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.540.000.000	
5 01 02 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	874.500.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	4 dokumen	874.500.000	
5 01 02 1.02 01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	214.500.000	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	214.500.000	
5 01 02 1.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Orang	198.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Orang	198.000.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 02 1.02 03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Sumatera Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Orang	187.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Sumatera Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Orang	187.000.000	
5 01 02 1.02 04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku	275.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku	275.000.000	
5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	95 persen	1.285.020.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	95 persen	1.285.020.000	
5 01 02 1.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	297.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	297.000.000	
5 01 02 1.03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Kerja Sama	-	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya Kerja Sama	-	
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	196.020.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	196.020.000	
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	792.000.000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	38 Dokumen	792.000.000	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	80 persen	8.249.030.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial serta menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dalam rangka menjaga sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah		Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD	80 persen	8.249.030.000	
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2.859.985.295	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 dokumen	2.859.985.295	
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	344.429.280	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	344.429.280	
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	238.355.500	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	238.355.500	
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	111.910.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	111.910.000	
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	143.013.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	143.013.300	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	493.757.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	493.757.800	
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	494.759.200	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	494.759.200	
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	369.463.490	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	369.463.490	
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	664.296.725	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	664.296.725	
5 01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2.495.692.693	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen	2.495.692.693	
5 01 03 1.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	424.382.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	424.382.000	
5 01 03 1.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	281.259.460	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	281.259.460	

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
5 01 03 1.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	150.602.730	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	150.602.730		
5 01 03 1.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	343.013.300	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	343.013.300		
5 01 03 1.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	476.710.960	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	476.710.960		
5 01 03 1.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	286.026.570	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	286.026.570		
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	190.684.385	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	190.684.385		
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	343.013.288	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	343.013.288		
5 01 03 1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2.893.352.012	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 dokumen	2.893.352.012		
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	462.737.540	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	462.737.540		

Kodefikasi	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	381.368.760	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	381.368.760	
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	333.697.600	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	333.697.600	
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	386.674.720	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	386.674.720	
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	462.737.530	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	462.737.530	
5 01 03 1.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	-	
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	338.355.480	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	338.355.480	
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	527.780.382	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	527.780.382	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Konsultasi Publik dan Musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi.

Untuk Bappeda Provinsi Sumatera Barat, tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, mengingat sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi Bappeda yang merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini yang menjadi bentuk pelayanan langsung Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarn / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
NIHIL					

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas program serta kerangka pendanaan yang menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja. RKP Tahun 2026 yang memuat substansi tahun pertama dari RPJMN Tahun 2025-2029 memuat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Berdasarkan tema RKP tersebut, maka sasaran pembangunan nasional pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga kedaulatan pangan dan energi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi produktif dan inklusif yang mengacu pada trisula pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu 1)Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan; 2)Penurunan Kemiskinan; dan 3)Peningkatan Kualitas SDM dengan sasaran dan terget sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Sasaran Pembangunan	Target 6
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) 3. GNI per Capita 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 	5,8 - 6,3 37,14 5.870 76,67
Penurunan Kemiskinan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan Ekstrem (%) 2. Tingkat Kemiskinan (%) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4. Rasio gini 	0 6,5 – 7,5 4,44 – 4,96 0,377 – 0,380
Sumber Daya Manusia Berkualitas <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Modal Manusia 	0,57

Sumber Data : Rancangan RKP Tahun 2026

Disamping memuat sasaran pembangunan, RKP Tahun 2026 juga memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan 8 prioritas nasional tahun 2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai Perangkat Daerah dengan tupoksi mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah mempunyai fungsi untuk mengawal ketercapaian program-program prioritas yang telah ditetapkan dan mengevaluasi efektivitas program terhadap perbaikan indikator-indikator makro di Sumatera Barat sehingga ketercapaian pembangunan di Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi terhadap ketercapaian pembangunan secara nasional. Disamping itu, arah pembangunan nasional harus menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian kebijakan yang ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga harus selaras dengan kebijakan Kementerian/Lembaga atau instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat, untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang menyatakan bahwa “Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026”, maka tujuan dan sasaran Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dirumuskan berdasarkan Rancangan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan rumusan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2026

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target RPJMD dan Renstra Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target pada Renja 2026
Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	94,92	94,59	94,92
Sasaran 1.1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	83,50	82,90	83,50
Sasaran 1.2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organsiasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	86,65	84,09	86,65
Sasaran 1.3 : Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	88,90	100	88,90

Sumber : Rancangan Renstra Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2025-2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa terdapat 1 indikator kinerja sasaran yaitu tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target dibawah realisasi tahun sebelumnya. Dalam hal ini bukan merupakan indikasi penurunan kinerja, tapi pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2029 terjadi perubahan formula penghitungan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penyesuaian formula tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran, memperkuat objektivitas penilaian, serta memastikan

keselarasan dengan standar nasional. Dengan demikian, meskipun secara angka target terlihat lebih rendah dibandingkan realisasi tahun berjalan, hal tersebut tidak mencerminkan penurunan capaian, melainkan merupakan konsekuensi logis dari penerapan formula perhitungan sesuai regulasi.

3.3. Program dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Rancangan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sekaligus mendukung pencapaian misi ke-8 Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, dan Pelayanan Publik yang efektif dengan sasaran Efisiensi dan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan.

Selanjutnya, Program dan Kegiatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Rencana Program tersebut terdiri atas 2 (dua) program perencanaan dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan, dengan potret rencana program pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran dari pogram ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator yang akan dicapai :

- 1) Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, dengan target 100%
- 2) Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dengan target 100%.

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dan indikator dari program ini adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan target 100%.
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan target 100%.
- 3) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA, dengan indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA, dengan target 100%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan target 100%.

Rencana program tersebut didukung oleh 14 kegiatan dan 66 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 21.716.978.058,- sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Prov. Sumatera Barat Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandangan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5 01	PERENCANAAN							21.716.978.058				29.220.724.000
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		100 persen		18.320.710.058			100 persen	15.696.694.000
5 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		100%		60.202.000			100%	112.143.460
5 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 dokumen		25.432.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	6 dokumen	62.312.460
5 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 laporan		5.490.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	2 laporan	14.147.500
5 01 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	5 laporan		29.280.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	5 laporan	35.683.500
5 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100%		11.126.535.112			100%	10.963.561.565
5 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	75 orang/bulan		10.894.551.112	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	75 orang/bulan	10.653.509.765

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 dokumen	216.720.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 dokumen	236.551.800
5 01 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	13 laporan	15.264.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		13 laporan	73.500.000
5 01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	106.759.690				100%	149.275.000
5 01 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 Dokumen	106.759.690	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 Dokumen	119.400.000
5 01 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 Laporan	29.875.000
5 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	128.750.000	APBD			100%	195.500.000
5 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	90 Paket	63.750.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		90 Paket	67.500.000
5 01 01 1.05 05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		75 Orang	65.000.000
5 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 Orang	65.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		10 Orang	63.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
5	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan umum perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	3.011.416.364			100%	1.507.760.791	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	18 jenis	33.872.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	24 jenis	21.000.000
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	8 jenis	159.248.914
5	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 Paket	164.590.700	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	12 Paket	164.590.500
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	62 Paket	295.006.854	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	62 Paket	310.000.000
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 jenis	264.394.600	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	10 jenis	26.250.000
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 Laporan	1.876.552.210	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	4 Laporan	540.021.377
5	01	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 Dokumen	377.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	4 Dokumen	286.650.000
5	01	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100%	1.410.338.160			100%	369.538.266	
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	670.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar	-	-

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandangan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 01 1.07 05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 Paket	220.834.700	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		4 Paket	157.500.000
5 01 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 unit	519.503.460	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 unit	212.038.266
5 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.831.278.732				100%	1.738.403.168
5 01 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 Laporan	371.340.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		12 Laporan	371.340.000
5 01 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	12 Laporan	1.459.938.732	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		12 Laporan	1.367.063.168
5 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik		100%	645.430.000				100%	660.511.750
5 01 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	10 unit	216.000.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		10 unit	357.000.000
5 01 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	6 Unit	99.830.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		6 Unit	61.750.000
5 01 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 unit	299.300.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		1 unit	210.261.750
5 01 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	35 Unit	30.300.000	APBD	Bappeda Prov. Sumbar		35 Unit	31.500.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD. 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RPKD	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD. 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RPKD		100 persen	2.076.600.000			100 persen	5.275.000.000
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan	Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan		3 dokumen	602.800.000			3 dokumen	3.050.000.000
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 dokumen	150.000.000
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	2 Dokumen	350.000.000
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Berita Acara	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 Berita Acara	300.000.000
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Berita Acara	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 Berita Acara	700.000.000
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun dan ditetapkan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	602.800.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	2 Dokumen	1.550.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
5	01	02	02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi Pelaksanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah		4 dokumen	1.210.340.000			4 dokumen	925.000.000	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	1.210.340.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	2 Dokumen	225.000.000
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	153 Orang	200.000.000
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Sumatera Barat	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	76 Orang	200.000.000
5	01	02	1.02	04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 Buku	300.000.000
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan		95 persen	263.460.000			95 persen	1.300.000.000
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	4 Laporan	62.220.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	4 Laporan	300.000.000

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 02 1.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		4 Laporan	200.000.000
5 01 02 1.03 04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	38 Dokumen	201.240.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		38 Dokumen	800.000.000
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA. 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA. 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100 persen	1.319.668.000				100 persen	8.249.030.000
5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		2 dokumen	551.397.000				2 dokumen	2.859.985.295
5 01 03 1.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	113.800.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 Dokumen	344.429.280
5 01 03 1.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 Laporan	238.355.500

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 1.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	111.910.000
5 01 03 1.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	77.897.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	143.013.300
5 01 03 1.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	114.400.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 Dokumen	493.757.800
5 01 03 1.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 Laporan	494.759.200
5 01 03 1.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sumatera Barat	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	369.463.490
5 01 03 1.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	245.300.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	664.296.725

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
5	01	03	1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		2 dokumen	391.810.000			2 dokumen	2.495.692.693	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	83.156.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	2 Dokumen	424.382.000
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	3 Laporan	281.259.460
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 Laporan	150.602.730
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	94.464.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	1 Laporan	343.013.300
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	2 Dokumen	69.290.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	2 Dokumen	476.710.960
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	3 Laporan	286.026.570

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 1.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Sumatera Barat	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	190.684.385
5 01 03 1.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	144.900.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	343.013.288
5 01 03 1.03	5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Meningkatkan kualitas perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah		2 dokumen	376.461.000				2 dokumen	2.893.352.012
5 01 03 1.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	2 Dokumen	113.496.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 Dokumen	462.737.540
5 01 03 1.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		3 Laporan	381.368.760
5 01 03 1.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	333.697.600
5 01 03 1.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	75.281.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	386.674.720

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program dan Kegiatan	Sandingan Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan		Anggaran Tahun 2026				Kelompok Sasaran	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Berdasarkan RPJMD dan Renstra	Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
5 01 03 1.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sumatera Barat	2 Dokumen	59.434.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		2 Dokumen	462.737.530
5 01 03 1.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Sumatera Barat	-	-	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	338.355.480
5 01 03 1.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	1 Laporan	128.250.000	APBD	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1 Laporan	527.780.382

3.4. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berkualitas serta mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), risiko didefinisikan lebih spesifik pada hal-hal yang mengancam pencapaian tujuan yaitu sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, risiko pemerintah daerah secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam risiko pemerintah daerah adalah risiko Perangkat Daerah, yang merupakan organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta risiko pada tingkatan kegiatan. Agar risiko-risiko tersebut bisa dikendalikan, maka Perangkat Daerah melakukan Pengelolaan Risiko Strategis. Pengelolaan Risiko Strategis ini bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Pengelolaan atas risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya maka akan baik pula penyelenggaraan SPIPnya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bappeda Provinsi Sumatera Barat melakukan identifikasi risiko terhadap pencapaian sasaran tujuan berdasarkan identifikasi terhadap faktor penghambat yang telah dijelaskan sebelumnya dengan hasil identifikasi sebagaimana pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.4 Identifikasi Risiko Strategis Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Tujuan : Tercapainya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas								
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah tepat waktu	Kepala Bappeda	1. Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan berkualitas. 2. Tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan tahapan perencanaan terhadap Perangkat Daerah. 3. Forum Perangkat Daerah dianggap			RKPD maupun Renja Perangkat Daerah disusun tanpa masukan yang komprehensif, sehingga kualitas dokumen tidak maksimal	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					formalitas, sehingga pelaksanaannya tidak diprioritaskan.				
			Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang	Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan yang semakin berkurang terhadap Pemerintah. 2. Mekanisme diskusi pada Konsultasi Publik dan Musrenbang belum sepenuhnya interaktif 			Rendahnya kualitas substansi dokumen perencanaan karena tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
			Terjadinya inkonsistensi anggaran per program antara RKPD dengan RPJMD	Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim verifikasi belum optimal mengawal fokus dan prioritas pada masing-masing OPD mitra. 2. Kurangnya kapasitas perencana dalam menganalisis 			Sinergitas antar dokumen tidak terjaga	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					<p>prioritas kinerja dalam dokumen perencanaan.</p> <p>3. Peraturan Gubernur tentang SAB dan SSH yang menjadi acuan dalam melakukan verifikasi belum terbit sesuai jadwal.</p>				
			Indikator kinerja perencanaan tidak terdefinisi dengan baik, sehingga sulit mengukur pencapaiannya	Kepala Bappeda	<p>1. Indikator bersifat imperatif</p> <p>2. Kurangnya kapasitas perencana dalam merumuskan indikator kinerja.</p>			Sulit menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
			Kualitas data dan informasi pembangunan rendah		<p>1. Belum optimalnya tata kelola Satu Data.</p> <p>2. kurangnya validasi data</p>			Analisis perencanaan tidak akurat, dan rekomendasi kebijakan lemah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
			Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai	Kepala Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya mekanisme pengendalian terhadap evaluasi rencana pembangunan. 2. Target IKU dan IKD bersifat imperatif. 3. Perumusan target yang kurang realitis tanpa mempertimbangkan kapasitas sumber daya, kondisi keuangan daerah, dan evaluasi kinerja sebelumnya. 4. Minimnya informasi dari SKPD terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai 			Menurunnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					bahan analisis data capaian kinerja pembangunan daerah dalam mengambil kebijakan sebagai tindak lanjut pengendalian kinerja berikutnya.				
			Hasil Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan data dan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah tentang kondisi sebenarnya dilapangan. 2. Instrumen pengendalian dan evaluasi belum memadai, baik itu mekanismen maupun SOP nya. 3. Koordinasi antar perangkat daerah serta keterlibatan 			Dokumen perencanaan kurang berbasis pada hasil evaluasi sehingga rekomendasi perbaikan kebijakan untuk perencanaan periode berikutnya tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan	

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					<p>pemangku kepentingan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan belum efektif.</p> <p>4. Evaluasi sering dipandang sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat perbaikan kebijakan.</p> <p>5. Kapasitas SDM Perencana dalam melakukan pengendalian dan evaluasi masih terbatas</p>				

**Tabel 3.5 Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026**

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Perangkat Daerah tidak melaksanakan Forum Perangkat Daerah tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Kalender Perencanaan kepada Perangkat Daerah. 2. Jadwal penyusunan RKPD sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Gubernur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat penegasan ulang kepada seluruh Perangkat Daerah tentang batas waktu pelaksanaan Forum Perangkat Daerah beserta konsekuensi jika terlambat. 2. Merekomendasikan penundaan pembahasan usulan PD yang terlambat melaksanakan forum Perangkat Daerah. 	Kepala Bappeda	Triwulan I
2	Belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pada saat pelaksanaan Konsultasi Publik dan Pelaksanaan Musrenbang	Pelaksanaan Musrenbang Tematik yang didahului dengan pelaksanaan FGD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan platform digital partisipatif untuk menjangkau masukan dari masyarakat. 2. Menindaklanjuti hasil Musrenbang dan menginformasikan kepada Publik melalui media massa. 	Kepala Bappeda	Triwulan I
3	Terjadinya inkonsistensi anggaran per program antara	1. Menyampaikan surat edaran kepada seluruh PD agar penyusunan Renja wajib merujuk pada RPJMD.	Monitoring tindak lanjut terhadap hasil verifikasi	Kepala Bappeda	Triwulan III

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	RKPD dengan RPJMD	2. Verifikasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah.			
4	Indikator kinerja perencanaan tidak terdefinisi dengan baik, sehingga sulit mengukur pencapaiannya	Menetapkan metadata dan definisi operasional yang jelas untuk setiap indikator	Menetapkan metadata dan definisi operasional yang jelas untuk setiap indikator	Kepala Bappeda	Triwulan III
5	Kualitas data dan informasi pembangunan rendah	Pelaksanaan Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penerapan satu data Indonesia berbasis digitalisasi. 2. Peningkatan kompetensi pengelola data. 3. Memaksimalkan Forum Rekonsiliasi Data per triwulan antara Bappeda, Perangkat Daerah, BPS, dan instansi vertical 	Kepala Bappeda	Triwulan III
6	Target IKU dan IKD banyak yang tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Monitoring pencapaian IKU dan IKD triwulanan. 2. Tersedianya Dashboard Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan OPD yang berisiko tidak mencapai target. 2. Monitoring strategi pelaksanaan program dan kegiatan. 3. Memaksimalkan pelaksanaan 	Kepala Bappeda	Triwulan IV

No	Risiko Strategis	Pengendalian yang Sudah Ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penganggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
			monitoring dokumen perencanaan.		
7	Hasil Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Monitoring Perencanaan ke lapangan. 2. Pelaksanaan Monitoring pencapaian IKU dan IKD triwulanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Pedoman atau SOP Mekanisme Pengendalian terhadap Evaluasi Rencana Pembangunan. 2. Menyediakan wadah bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah. 	Kepala Bappeda	Triwulan IV

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat diperlukan suatu instrumen berupa rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rancangan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Arah kebijakan serta fokus prioritas rencana kerja sesuai dengan RKPD Tahun 2026 dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
2. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan/sub kegiatan

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat terutama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta mendukung prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator yang akan dicapai :
 - 1) Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD, dengan target 100%
 - 2) Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dengan target 100%.

Substansi yang menjadi target kinerja pada program ini ditahun 2026 antara lain :

- 1) Penyusunan RKPD Tahun 2027
- 2) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026

3. Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dan indikator dari program ini adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan target 100%.
- 2) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan target 100%.
- 3) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA, dengan indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA, dengan target 100%.

Substansi yang menjadi target kinerja pada program ini di tahun 2026 antara lain :

- 1) Verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026
- 2) Penyusunan Penyusunan Dokumen Rendah Karbon/Ekonomi Hijau/Green Province.
- 3) Penilaian Kinerja Stunting

Berdasarkan program dan target dokumen yang dihasilkan pada program tersebut di atas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
PENUNJANG URUSAN	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah di SIPD
	9	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	21	Pengadaan Mebel
	22	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PERENCANAAN		
B	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	
IX	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	30	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
	31	Pelaksanaan Konsultasi Publik

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	32	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
	33	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
X		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	34	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	35	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
	36	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	37	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
XI		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	38	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
	39	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	40	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
C.		Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
XII		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	41	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	42	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
	44	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
	45	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	46	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	47	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	48	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
XIII		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	49	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	50	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		
	51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
	52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
XIV		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
	61	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	62	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
	63	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah, maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Program/kegiatan/sub kegiatan sesuai peraturan dimaksud dengan 3 Program, 14 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan.

4.2 Pendanaan

Sumber pendanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2026 adalah APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu indikatif sebesar Rp 21.716.978.058,- (Dua puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) sebagaimana telah diinputkan dalam SIPD RI dengan rincian sebagai berikut.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						21.716.978.058,00							29.220.724.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						4.066.268.000,00							13.524.030.000,00	
	5.01	PERENCANAAN						4.066.268.000,00							13.524.030.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	-			100 %	670.000.000,00						-	0,00	
		[Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi]	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	100	100	670.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	670.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	670.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD</i>	-			100 %	2.076.600.000,00						-	5.275.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	2.076.600.000,00	-	-	-	-	-	-	5.275.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan</i>	-			2 Dokumen	602.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	3.050.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)</i>				1 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	2.076.600.000,00	-	-	-	-	-	-	5.275.000.000,00	-
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>				2 Dokumen	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	2.076.600.000,00	-	-	-	-	-	-	5.275.000.000,00	-
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</i>				1 Berita Acara	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi</i>				1 Berita Acara	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>				2 Dokumen	602.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		1.550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	1.210.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	925.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	1.210.340.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				153 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				76 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>				1 Buku	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan</i>	-			95 %	263.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	1.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				4 Laporan	62.220.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				4 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>				38 Dokumen	201.240.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. <i>Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			100 %	1.319.668.000,00						-	8.249.030.000,00		
		[Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	1.319.668.000,00	-	-	-	-	-	-	8.249.030.000,00	-	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			2 Dokumen	551.397.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	2.859.985.295,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	113.800.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		344.429.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				3 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		238.355.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		111.910.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>				1 Laporan	77.897.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		143.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	114.400.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		493.757.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				3 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		494.759.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		369.463.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>				1 Laporan	245.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		664.296.725,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	1.319.668.000,00	-	-	-	-	-	-	8.249.030.000,00	-
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	-			2 Dokumen	391.810.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	2.495.692.693,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	83.156.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		424.382.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				3 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		281.259.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		150.602.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>				1 Laporan	94.464.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		343.013.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	69.290.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		476.710.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				3 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		286.026.570,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>				1 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		190.684.385,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>				1 Laporan	144.900.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		343.013.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	1.319.668.000,00	-	-	-	-	-	-	8.249.030.000,00	-
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	-			2 Dokumen	376.461.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	2.893.352.012,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				2 Dokumen	113.496.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		462.737.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				3 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		381.368.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		333.697.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>				1 Laporan	75.281.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		386.674.720,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>				2 Dokumen	59.434.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		462.737.530,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		338.355.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i>				1 Laporan	128.250.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		527.780.382,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X	NON URUSAN						17.650.710.058,00							15.696.694.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						17.650.710.058,00							15.696.694.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</i>	-			100 %	17.650.710.058,00						-	15.696.694.000,00	
		-	-	-	-	-	-	17.650.710.058,00	-	-	-	-	-	-	15.696.694.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	-			100 %	60.202.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	112.143.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	25.432.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		62.312.460,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Laporan	5.490.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		14.147.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	29.280.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		35.683.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	-			100 %	11.126.535.112,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	10.963.561.565,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				75 Orang/Bulan	10.894.551.112,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		10.653.509.765,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	216.720.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		236.551.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				13 Laporan	15.264.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		73.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</i>	-			100 %	106.759.690,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	149.275.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				4 Dokumen	106.759.690,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		119.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		29.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			100 %	128.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	195.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				90 Paket	63.750.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		67.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				75 Orang	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				10 Orang	65.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		63.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	3.011.416.364,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	1.507.760.791,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				18 Paket	33.872.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		21.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	0,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		159.248.914,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	164.590.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		164.590.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				62 Paket	295.006.854,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				10 Paket	264.394.600,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		26.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	1.876.552.210,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		540.021.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				4 Dokumen	377.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		286.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan</i>	-			100 %	740.338.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	369.538.266,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				4 Paket	220.834.700,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		157.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	519.503.460,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		212.038.266,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	1.831.278.732,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat	-	1.738.403.168,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	371.340.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		371.340.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.459.938.732,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Bappeda Provinsi Sumatera Barat		1.367.063.168,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	645.430.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder	-	660.511.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	216.000.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		357.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	99.830.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		61.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	299.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		210.261.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				35 Unit	30.300.000,00	Kota Padang, Padang Barat, Flamboyan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Stakeholder		31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			J U M L A H					21.716.978.058,00							29.220.724.000,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Bappeda Tahun 2026 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2026. Selanjutnya Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda serta sebagai acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI